

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada 25 Juni 1950, peperangan Korea Utara dan Korea Selatan dimulai. Itu berlangsung hingga 27 Juli 1953. Terlepas dari betapa lama konflik ini berlangsung, belum ada penyelesaian yang dicapai dan terus berlanjut, yang menarik perhatian dunia terhadap perkembangan konflik di Semenanjung Korea. Dorongan kekuasaan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet memecah Semenanjung Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Akibatnya, Korea Utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Perkembangan wilayah Korea sangat dipengaruhi oleh perbedaan ideologi antara dua negara penguasa, yaitu Uni Soviet yang menganut Komunisme dan Amerika Serikat yang menganut Kapitalisme. Ideologi dari kedua negara ini sangat mengubah Korea hingga saat ini.<sup>1</sup>

Setelah Semenanjung Korea dibagi menjadi dua negara, pembangunan di bagian utara tampaknya semakin otoriter. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya Juche, ideologi nasional yang mendukung kemerdekaan ekstrim. Keyakinan yang sangat besar atau ekstrem terhadap kemampuan untuk hidup dan berkembang secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain adalah inti dari Juche. Perlakuan yang dilakukan oleh negara menunjukkan otoritarianisme, seperti pemujaan terhadap Kim Il-sung, pemimpin tertinggi Korea Utara pertama, dan putranya, Kim Jong-il, dan pemberian gelar abadi kepada mereka.<sup>2</sup>

Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus memburuk setelah tahun 1990 (tetapi sebelum abad ke-21), terutama ketika Kim Jong-Il naik takhta setelah ayahnya. Namun, tindakan telah diambil untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Zona Industri Khusus Kaesong adalah salah satu tindakan yang diambil.

---

<sup>1</sup> William Stueck, Jack L Snyder, and Richard H Ullman, *The Korean War : An International History* (New Jersey: Princeton University Press, 1997) (William Stueck, 1997)

<sup>2</sup> Akaha Tsu neo,(2002). "The Future of North Korea". New York : Routledge. Hal. 110 (Akaha, 2002)

Kompleks Industri Kaesong (KIC) berlokasi di Kaesong. Ini terletak sekitar 10 km di sebelah utara zona demiliterisasi (DMZ) di bagian selatan Korea Utara. Kompleks ini beroperasi sejak Desember 2004 dan diawasi oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Ini dianggap sebagai bagian dari "Kebijakan Cahaya Matahari", reformasi ekonomi yang dimulai oleh Presiden Korea Utara Kim Jong-il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung. Dianggap sebagai permulaan periode perdamaian antara kedua negara melalui kolaborasi ekonomi.<sup>3</sup>

Hubungan Korea Utara-Korea Selatan pada tahun 2010-an terus berkembang. Hubungan Korea-Utara menjadi lebih baik ketika Kim Jong-un, pemimpin tertinggi ketiga Korea Utara, mengambil alih pada tahun 2011. Kim Jong-un, yang lahir pada tahun 1983, menjadi yang termuda dari tiga pemimpin tertinggi tersebut pada awal masa jabatannya.

Sebaliknya, Kim Jong-un mengadopsi gaya kepemimpinan yang otoriter dan militeristik yang sama seperti kakeknya dan ayah-kakeknya. Metode ini telah terbukti berhasil dalam memegang kendali atas orang-orang baik di militer maupun di masyarakat umum. Akibatnya, kebijakan yang berubah menuju reunifikasi dianggap tidak mungkin kecuali ada perubahan besar dalam kondisi saat ini yang membuat rezim menyadari bahwa meninggalkan gaya kepemimpinan ini akan menguntungkan.

Dari sudut pandang Korea Utara, pemerintah percaya bahwa mereka berada dalam posisi dominan untuk menentukan bagaimana reunifikasi dapat terjadi. Hal ini tercermin dari fakta bahwa rezim Korea Utara memiliki sejumlah faktor kunci yang membuatnya merasa berhak untuk mengatur sebagian besar, jika tidak semua, kondisi untuk reunifikasi secara damai. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, Korea Utara dapat menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi pada Perang Korea 1950, untuk mewujudkan reunifikasi.

Istilah reunifikasi umumnya dikaitkan dengan dimensi politik. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan situasi politik saat ini di kedua Korea. Aspek budaya,

---

<sup>3</sup> Alexandra Eremia, (2022). "Dual construction of North Korean women in South Korean space Negotiating identity Between acceptance and rejection". Goethe-University, Frankfurt am Main.hal. 5 (Eremia, 2022)

meskipun penting, tidak terlalu berkaitan dengan upaya reunifikasi karena pada dasarnya Korea Utara dan Korea Selatan masih memiliki budaya yang sama.

Reunifikasi adalah ketika sebuah masyarakat atau negara bersatu kembali setelah terbagi menjadi dua. Proses reunifikasi sendiri dimulai dengan fase yang disebut integrasi; dalam konteks negara, fase ini melibatkan pengintegrasian semua perbedaan yang ada antara pihak yang akan disatukan, termasuk masyarakat, kepentingan, budaya, bahasa, dan latar belakang. Sebenarnya, proses integrasi politik, dan pada akhirnya penyatuan, dimulai dengan memahami perbedaan-perbedaan ini. Untuk mencapai integrasi, pihak-pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan atau kesepakatan mengenai perbedaan-perbedaan ini. Proses ini menghasilkan keadaan "Persatuan", di mana perbedaan-perbedaan menjadi satu.

Menurut Ernst Haas, integrasi politik adalah proses di mana negara meninggalkan kemampuan dan keinginan untuk membuat keputusan penting dan keputusan nasional secara mandiri dan memilih untuk menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada badan baru yang terpusat.<sup>4</sup> Reunifikasi terjadi setelah proses selesai, sehingga menerapkan kembali proses dan kondisi tersebut. Perubahan yang mungkin terjadi pada awalnya tidak lagi dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Salah satu faktor utama kegagalan upaya reunifikasi adalah perbedaan ideologi dan sistem politik antara kedua negara. Korea Utara memiliki sistem politik komunis yang otoriter, dan Korea Selatan memiliki sistem politik liberal-demokratis yang lebih terbuka. Perbedaan ini telah menciptakan jurang pemisah yang sulit dijembatani dalam upaya reunifikasi, karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang tatanan politik dan sosial yang diinginkan.

Selain itu, ketegangan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan menghalangi upaya reunifikasi. Sementara Amerika Serikat adalah sekutu utama Korea Selatan, Korea Utara memiliki program nuklir dan senjata konvensional yang

---

<sup>4</sup> Nikola L. Ilievski, "The Concept of Political Integration", *Journal of Liberty and International Affairs*, Bitola, 2015, h. 6. (Ilievski, 2015)

kuat. Ketidakpercayaan meningkat karena ketegangan ini, yang menghambat percakapan antara kedua negara.

Pada periode 2020-2024, kebijakan sanksi internasional terhadap Korea Utara juga mempengaruhi upaya reunifikasi. Korea Utara merupakan subjek sanksi internasional yang berat karena program nuklirnya. Sanksi ini membatasi kemampuan Korea Utara untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat ekonominya. Sanksi ini juga mempengaruhi upaya reunifikasi dengan Korea Selatan.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga berkontribusi pada kegagalan upaya penyatuan kembali. Negara-negara tetangga seperti Cina, Jepang, dan Rusia memiliki kepentingan yang berbeda di wilayah ini dan seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan yang cukup untuk mendukung penyatuan kembali. Dalam konteks upaya reunifikasi yang gagal pada tahun 2020-2024, penting untuk melihat kurangnya kemauan politik di kedua belah pihak. Kedua negara memiliki perbedaan besar dalam hal ideologi, sistem politik, dan kepentingan nasional, yang sulit diatasi tanpa komitmen yang kuat dari kedua belah pihak.

Kompleksitas hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang telah terpecah sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sejak perpisahan kedua negara pada tahun 1945, Semenanjung Korea telah menjadi kawasan yang sangat tegang, dengan berbagai upaya reunifikasi yang sering kali terganjal oleh perbedaan ideologi, politik, dan kepentingan strategis masing-masing negara.

Pada tahun 2020-2024, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan mengalami serangkaian ketegangan yang signifikan, dipicu oleh kebijakan agresif Korea Utara yang terus mengembangkan program nuklirnya dan melakukan uji coba rudal balistik. Di sisi lain, Korea Selatan, di bawah pemerintahan yang lebih moderat, berusaha mencari jalan menuju perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Korea Utara, yang sering kali bersifat provokatif dan tidak kompromistis, menjadikan upaya reunifikasi semakin sulit diwujudkan.

Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya isolasi Korea Utara di panggung internasional, yang semakin mempersulit upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. Meskipun ada beberapa pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin negara, hasil yang diharapkan berupa langkah konkret menuju reunifikasi tidak pernah tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas kebijakan Korea Utara dalam konteks upaya reunifikasi, dan bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap kegagalan proses ini.

Maka dari itu, penelitian ini menyelidiki kebijakan Korea Utara selama upaya reunifikasi Korea Selatan yang gagal pada tahun 2020–2024. Selama periode ini juga, aspek Korea Utara yang menyebabkan kegagalan reunifikasi menjadi sangat jelas. Karena kekuatan nuklir, ideologi Juche, dan militer mereka, pemerintah otoriter ini merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan melihat penyebab kegagalan ini dari sudut pandang Korea Utara, ada peluang yang lebih besar untuk memahami apa yang seharusnya berhasil. Ini akan sangat membantu kedua Korea yang berbeda saat ini.

## **1.2. Pokok Masalah**

Berdasarkan masalah sebelumnya, Korea Utara dan Korea Selatan telah mengalami konflik atau perang yang cukup lama sejak tahun 1950an. Upaya: Banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, tetapi belum mencapai titik terang. Termasuk upaya terus-menerus untuk bersatu. Pada tahun 2018, pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan mengadakan pertemuan di zona demiliterisasi dalam upaya untuk mencapai rekonsiliasi. Pada tahun yang sama, Presiden Korea Selatan pertama kali berkunjung ke Korea Utara. Akhirnya, hasil dari semua upaya ini adalah kesepakatan Panmunjeom, atau Deklarasi Panmunjeom.

Namun, hubungan mereka kembali memanas pada tahun 2020. Pada musim panas tahun itu, ledakan di Kantor Penghubung Antar-Korea di Kaesong pada 14 Juni 2020 menurunkan hubungan mereka. Selanjutnya, ditahun-tahun berikutnya hubungan kedua korea Kembali semakin memanas. Pada tahun 2024, Kim Jong Un yang merupakan presiden Korea Utara menghancurkan sebuah monumen yang

melambangkan cita-cita rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Dengan demikian, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah upaya-upaya perdamaian telah dilakukan untuk kedua negara. Namun, Korea Utara masih enggan untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai dengan ditandainya terus menggagalkan upaya reunifikasi dengan sebuah kebijakannya yang terkesan menguntungkan satu pihak saja yaitu Korea Utara.

### 1.2.1. Pertanyaan Penelitian

Penulis telah menetapkan pertanyaan penelitian sebagai langkah pertama perencanaan, yang berfungsi sebagai batasan untuk memastikan fokus pada topik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pembahasan selanjutnya tetap sesuai dan tidak melenceng. Pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertanyaan pokok sebagai berikut.

#### 1.2.1.1. Pertanyaan Pokok

*"Mengapa kebijakan Korea Utara tidak mendukung upaya reunifikasi dengan Korea Selatan selama 2020-2024?"*

### 1.3. Keunggulan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa keunggulan yang ingin penulis capai melalui tulisan skripsi tersebut, berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah yang nantinya ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Terdapat dua tujuan utama dari penelitian yang akan penulis lakukan pada skripsi penulis:

- a. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjelaskan konteks isu-isu terkini di Semenanjung Korea, sehingga temuan-temuannya memiliki relevansi yang tinggi dengan situasi politik dan keamanan saat ini. Fokus pada kebijakan militer Korea Utara dan implikasinya terhadap proses reunifikasi serta keamanan regional.
- b. Pada Penelitian ini penulis juga ingin menjelaskan hubungan antara kebijakan militer Korea Utara dan kegagalan reunifikasi Korea. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang sering diabaikan dalam studi-studi sebelumnya, penelitian ini menambah nilai tambah yang signifikan bagi literatur yang ada dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada berbagai pihak dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi teoritis, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkaya kajian Hubungan Internasional yang berkaitan dengan konflik Korea Utara dan Korea Selatan terutama dalam gagalnya upaya reunifikasi diantara kedua negara.
- b. Memberikan pemahaman dan pemikiran mengenai Permasalahan atau Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan
- c. Sebagai bahan referensi dan kepustakaan dalam Ilmu Hubungan Internasional yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konflik korea utara dan selatan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut di kemudian hari.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Selain kegunaan teoritis, Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat praktis dalam hal-hal berikut:

###### **1) Bagi Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai dinamika konflik korea utara dan selatan dan juga memberikan gambaran mengenai gagalnya upaya reunifikasi.

###### **2) Bagi Universitas Nasional**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah bahan bacaan hasil penelitian bagi mahasiswa/i atau pengajar Hubungan Internasional di Universitas Nasional yang mungkin dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau dikaji lebih dalam lagi untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.



### 1.5. Sistematika Penulis

Untuk membuat pembahasan penelitian ini lebih mudah dipahami oleh penulis dan pembaca, penulis akan memberikan penjelasan yang sistematis tentang materi penelitian. Secara sistematis, proposal skripsi ini disusun menjadi enam bab, masing-masing dengan fokus yang berbeda, tetapi saling mendukung dan melengkapi.

#### 1. **BAB I : PENDAHULUAN**

merupakan garis besar konsep umum yang dimasukkan ke dalam konteks yang ringkas dan jelas. Oleh karena itu, uraian tulisan dimulai dengan latar belakang masalah, termasuk alasan pemilihan judul dan urgensi pembahasan topik tersebut. Setelah itu, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, keuntungan, dan sistematika penelitian dibahas.

#### 2. **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

merupakan tinjauan pustaka atau literature review, berisi landasan teori yang mencakup penjelasan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, termasuk artikel-artikel dalam jurnal yang digunakan penulis sebagai bahan referensi dalam penelitian mereka, serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.

#### 3. **BAB III : METODE PENELITIAN**

mencakup aspek, dimensi, dan parameter, serta metode dan jenis penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, dan metode pengolahan dan analisis data.

#### 4. **BAB IV : GAGALNYA REUNIFIKASI KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN SEPANJANG TAHUN 2020-2024**

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Sejarah terpecahnya korea utara, upaya untuk reunifikasi, ketegangan yang terjadi selama 2020-2024, dampak dan faktor gagalnya reunifikasi serta negara-negara yang mendukung upaya reunifikasi kedua korea.

#### 5. **BAB V : DAMPAK DAN KEBIJAKAN KOREA UTARA DALAM REUNIFIKASI**



yaitu pembahasan yang berisikan penjelasan dampak dari kebijakan korea utara dan juga menjelaskan dan menganalisis kebijakan korea utara serta keterhubungannya dengan kegagalan reunifikasi

#### 6. **BAB VI : KESIMPULAN**

Pada bab akhir memuat rangkuman keseluruhan yang menjawab pertanyaan pokok penelitian ini. dan penjelasan yang telah penulis berikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini.

